

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BIMA**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana(S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

NURUL FADILLAH
NIM : 2019B1D049

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA BIMA**



Disusun Dan Diajukan Oleh:

NURUL FADILLAH
NIM : 2019B1D049

Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi mataram, 28 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
NIDN: 0031126484

Pembimbing II

Rifald, S.IP., M.IP
NIDN: 0812118704

Menyetujui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN: 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI




**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA BIMA**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FADILLAH
NIM : 2019B1D049

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 30 Juni 2023 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Mustamin H. Idris, MS** (PU) 
NIDN. 0031126484
2. **Rifaid, S.IP., M.IP** (PP) 
NIDN. 0812118704
3. **Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom** (PN) 
NIDN. 0831128310

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Muhammadiyah mataram menyatakan bahwa:

Nama : Nurul Fadillah
NIM : 2019B1D049
Alamat : Karang Medain Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul “ Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima ” Adalah Hasil karya sendiri Dan diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

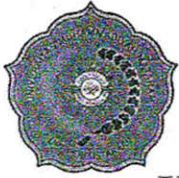
Jika dikemudian hari pernyataan ini benar, maka saya siap mempertanggungjawabkannya, serta bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang diperoleh. Demikian surat ini saya buat dengan sadar tanpa keterpaksaan dari pihak manapun.

Mataram, 06 juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nurul Fadillah
2019B1D049



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadillah
NIM : 2019310049
Tempat/Tgl Lahir : Bima 29-12-2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 081-237-793-755
Email : np.29122000@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 1 Agustus 2023

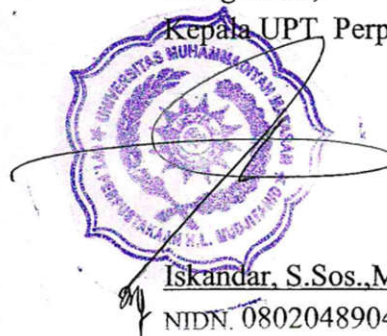
Penulis



Nurul Fadillah
NIM. 2019310049

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*dilih salah satu vanx sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadilah.....
 NIM : 2019010049.....
 Tempat/Tgl Lahir : Bima 29-12-2000.....
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....
 Fakultas : Fisiol.....
 No. Hp/Email : 081-237-793-755 / n.f.2019.2000@gmail.com.....
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)..
 ..Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima.....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 1 Agustus.....2023
 Penulis



Nurul Fadilah.....
 NIM. 2019010049

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

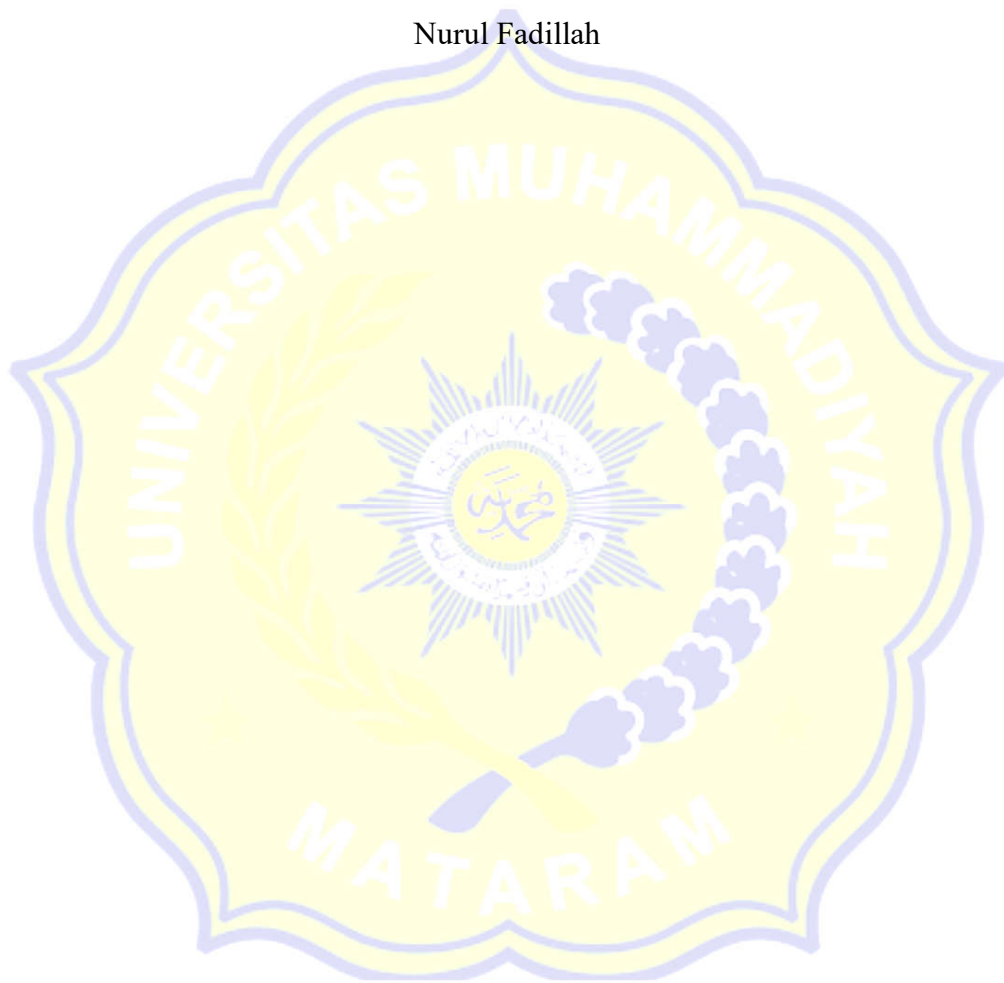


Iskandar, S.Sos.,M.A. udy
 NIDN: 0802048904

Motto

**"Janganlah Pernah Menyerah Ketika Kamu Masih Mampu Berusaha Lagi,
Tidak Ada Kata Berakhir Sampai Kamu Berhenti Mencoba".**

Nurul Fadillah



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Abdul Salam Dan Ibu Faridah) yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Yang Terus berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberikan kepadamu wahai pahlawan abadi.
3. Kakak ku (Gita dan Indah), dan adik ku (Fayruz) dengan sekuat tenaga telah menyemangatiku serta memperhatikanku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II (Bapak Drs. H Mustamin H. Idris, MS Dan Bapak Rifaid, S.IP.,M.IP) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas B yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.

Teruntuk abangku Shohibul Hamdan terimakasih untuk kehadiran dan kesabaranmu yang selalu membantuku dalam bentuk tenaga serta waktu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BIMA” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman yang beradap hingga saat ini, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan pada kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses perjalanan akademik penulisan maupun penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku ketua Prodi ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris.,MS selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rifaid, S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang Tua saya tercinta yang selalu memberikan saya Do'a,dukungan,sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan skripsi ini, bias diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mataram, Agustus 2023
Peneliti,

Nurul Fadillah
NIM. 2019B1D049

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima

Nurul Fadillah¹, Rifa'id², H. Mustamin, H. Idris³

Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bima adalah salah satu badan milik pemerintah daerah yang bertugas menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah. BPKAD Kota Bima dalam meminimalisir hambatan dalam meningkatkan PAD nya dengan melakukan berbagai strategi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi yang dimiliki oleh BPKAD serta faktor penghambat dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan menggunakan analisis data secara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa BPKAD telah melakukan 4 (empat) strategi dalam upaya meningkatkan PAD dan mempermudah pelayanan wajib pajak yaitu 1) menguatkan peraturan daerah terhadap pendapatan daerah sebagai acuan BPKAD dalam menetapkannya, 2) melakukan pendataan semua objek pajak terhadap potensi yang lama lalu diperbarui, 3) melakukan pemeriksaan atas wajib pajak, 4) membuat saluran digital untuk pembayaran secara uang tunai online. Faktor penghambat yang ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan masih kurangnya tenaga kerja pada instansi BPKAD. Sehingga mempengaruhi terhadap peningkatan dan penurunan PAD.

Kata Kunci: Strategi, BPKAD, PAD

**STRATEGIES OF THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET
MANAGEMENT AGENCY (BPKAD) IN ENHANCING LOCAL REVENUE
(PAD) OF KOTA BIMA**

*Nurul Fadillah¹, Rifa'id², H. Mustamin, H. Idris³
Student¹, First Supervisor², Second Supervisor³*

*Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram*


ABSTRACT

The Regional Financial and Asset Management Agency of Kota Bima is a local government-owned agency tasked with drafting revenue management policies. BPKAD Kota Bima employs various techniques to reduce impediments to increasing its Local Revenue (PAD). This study seeks to identify the strategies employed by BPKAD and the factors that prevent PAD from developing. The research employs a qualitative, descriptive research methodology. Observation, documentation, and interviews are techniques for collecting data. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and inference.

The findings of this study reveal that BPKAD has implemented four strategies to enhance PAD and facilitate taxpayer services, which include: 1) strengthening local regulations on local revenue as BPKAD's reference for determination, 2) conducting a comprehensive assessment of all taxable objects to update outdated data, 3) conducting audits on taxpayers, and 4) establishing digital channels for online cash payments. The inhibiting factors identified are the lack of public awareness to comply with tax payments and the insufficient workforce within the BPKAD institution. These factors subsequently influence fluctuations in PAD.

Keywords: *Strategies, BPKAD, Local Revenue (PAD).*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Strategi	13
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak	17
2.5 Kerangka Berpikir	22
BAB III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	24
3.3 Pemilihan Informan/Responden	24
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Tehnik Analisis Data.....	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHSAN	30
4.1 Gambaran umum BPKAD Kota Bima	30

4.2 Strategi BPKAD Dalam Meningkatkan PAD Kota Bima	34
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat meningkatkan PAD.....	50
BAB V. KESIMPILAN DAN SARAN	52
5.1 KESIMPULAN	52
5.2 SARAN	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima, menurut Obyek Pendapatan Tahun 2020	6
Table 2 Daftar Nama Informan/Responden	26
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Daerah Kota Bima Tahun 2020.....	38
Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Daerah Kota Bima Tahun 2020.....	39
Tabel 4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya Tahun 2020.....	43
Tabel 4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Daerah Kota Bima Tahun 2021.....	47
Tabel 4.5 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Daerah Kota Bima Tahun 2021.....	48
Tabel 4.6 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya Tahun 2021.....	52
Tabel 4.7 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Daerah Kota Bima Tahun 2022.....	55
Tabel 4.8 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Daerah Kota Bima Tahun 2022.....	56
Tabel 4.9 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Daerah Yang sah Lainnya Tahun 2022.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bima merupakan salah satu kota yang sampai sekarang daerah yang terhampar di ujung pulau Sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kota Bima saat ini telah memiliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km². Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah yaitu pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis serta pertumbuhan penduduk yang tinggi (Portal.bimakota)

Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, serta ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, meningkatnya responsif masyarakat, partisipasi publik dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik (Mahmudi, 2010)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk

mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya. Dengan demikian pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, oleh karena itu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran APBD yaitu pada belanja modal yang bisa dilakukan pemerintah daerah antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan mampu dalam pembiayaan dan pembangunan daerahnya yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat daerah dengan cara pemungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. (Yunita 2021)

PAD merupakan sumber utama dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah. PAD di Kota Bima yaitu bersumber dari pemungutan pajak PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), pajak hotel, pajak restoran, rumah makan, dan reklame yang dianggap berpotensi dalam menyumbangkan PAD nya. Pajak yang ditentukan oleh daerah merupakan pemungutan pajak yang masuk dalam APBD, dalam Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berisi tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai belanja daerah dalam pembangunan maupun pelayanan sosial bagi masyarakat. Laporan APBD masing-masing daerah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah wajib melaporkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya kepada masyarakat, guna tercapainya asas transparansi dari pelaporan. Masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan apakah pengalokasian nya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya karena dianggap menguntungkan dari segi sosial dan ekonomi yang dapat di peroleh manfaatnya bagi kesejahteraan

rakyat. Hal ini agar terbentuknya kemandirian daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Sari dan Mustanda, 2019).

Pajak daerah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efektivitas dan efisiensi merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan yang hak maupun penggunaan sistem bagi peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian serta taraf hidup yang baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan, Peran serta masyarakat diharapkan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, terutama dalam partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbaikan dan penataan administrasi dan manajemen yang mempunyai peranan penting pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima (BPKAD), terutama dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat menyediakan informasi yang berdaya guna dan berhasil guna baik bagi pimpinan maupun bagi pihak lain yang memerlukan (Wardani dan Nursansiwi 2020).

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian pemerintah menerbitkan kembali peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di tuangkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 dalam rangka untuk mendukung kemudahan burusaha dan layanan daerah (Fazry 2018).

Pentingnya strategi yang diberikan bagi suatu organisasi yaitu agar suatu organisasi mampu dalam hal merencanakan serta merumuskan dan mengimplementasikan segala tujuan yang ingin dicapai, agar strategi tersebut mampu mencapai visi dan misi secara efektif dan efesien serta unggul dalam bersaing demi keuntungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang atau secara terus menerus kedepannya. Konsep strategi yang di terapkan oleh pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan PAD yaitu: (1) Pendataan secara aktif, (2) Pemuktahiran data, (3) Koordinasi atau kerjasama antar instansi dan pembayaran berbasis “Online”.

Strategi ini digunakan oleh pemerintah daerah serta instansi BPKAD dalam membantu masyarakat terhadap pelayanan. Karena untuk mengoptimalkan pelayanan maupun pengawasan terhadap wajib pajak yang selama ini terdapat kendala dalam pengawasan dan penagihan kepada wajib pajak atau kurangnya petugas turun langsung di lapangan menyebabkan berbagai hambatan sehingga mempersulit petugas dalam pengecekan kebenaran jumlah pajak yang disetorkan, sudah sesuai atau belum dengan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dibayarkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dan kepatuhan dari wajib pajak ini memiliki keterkaitan dengan budaya dan masyarakat, yaitu dimana budaya dari masyarakat Kota Bima yang patuh akan peraturan (hukum) sehingga mempengaruhi pula kepatuhan mereka terhadap apa yang menjadi kewajibannya (Yunita 2021)

Dapat dilihat bahwa berkembangnya Kota Bima saat ini mempengaruhi pula PAD selama dua tahun terakhir yang bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel, restoran, reklame, dan PBBP2.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima,
menurut Obyek Pendapatan Tahun 2020

Kode Rek	JENIS PAD	PAD KOTA BIMA TAHUN 2020		%
		TARGET	REALISASI	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	19,719,858,600.00	18,558,631,974.13	94.11
4.1.1.01	Pajak Hotel	300,000,000.00	200,630,863.50	66.88
4.1.1.02	Pajak Restoran	738,750,000.00	1,326,384,079.71	179.54
4.1.1.03	Pajak Hiburan	23,750,000.00	24,028,240.00	101.17
4.1.1.04	Pajak Reklame	522,358,600.00	593,788,492.25	113.67
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	9,000,000,000.00	8,339,356,068.00	92.66
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	-
4.1.1.07	Pajak Parkir	60,000,000.00	92,195,500.00	153.66
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	30,000,000.00	46,406,476.42	154.69
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	15,000,000.00	31,500,000.00	210.00
4.1.1.10	Pajak Lingkungan	-	-	-
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400,000,000.00	361,976,516.25	90.49
4.1.1.12	Pajak Bumi dan	5,000,000,000.00	3,939,839,288.00	78.80

	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,630,000,000.00	3,602,526,450.00	99.24

Sumber: BPKAD, Kota Bima 2020

Dari data di atas instansi BPKAD Kota Bima menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 yang ditargetkan PAD awal Rp.19,72 miliar namun realisasinya sebesar Rp.18,56 miliar dan mempengaruhi beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan antara lain, target PAD pajak hotel sebesar Rp.300.00 juta namun terealisasi sebesar Rp.200.00 juta dengan presentasi 66.88% dari PAD yang telah ditargetkan sebelumnya, sedangkan pajak restoran ditargetkan Rp. 700.00 juta namun terealisasi sebesar Rp. 1 miliar dengan presentasi 179.54%, kemudian pajak hiburan sebesar Rp.23,750 juta dan terealisasi sebesar Rp.24,028 juta dengan presentasi 101.17%.

Selanjutnya Pajak reklame sebesar Rp.522,358 juta dan terealisasi sebesar Rp.593,788 juta dengan presentasi 113,67%, pajak penerangan jalan sebesar Rp.9 miliar namun terealisasi sebesar Rp.8 miliar dengan presentasi 92,66%, pajak parkir sebesar Rp. 60 juta dan terealisasi sebesar Rp.92,195 juta dengan presentasi 153.66%, pajak air tanah sebesar Rp.30 juta dan terealisasi sebesar Rp.46 juta dengan presentasi 154.69%, pajak sarang burung walet sebesar Rp.15 juta dan dapat terealisasi sebesar Rp.31 juta dengan presentasi 210.00%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.400 juta dan terealisasi sebesar Rp.361 juta dengan presentasi 90.49%, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.5 miliar namun terealisasi

sebesar Rp.3 miliar dengan presentasi 78.80%, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 3,630 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 3,602 miliar dengan presentasi 99.24%. (BPKAD, Kota Bima 2020).

Dari data tahun 2020 dan 2021 tentu ada pencapaian dari tahun ke tahun di lihat dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 18,56 miliar sedangkan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah yang di targetkan sejumlah Rp. 59 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 47 miliar atau 79,78 persen dari target. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima tahun 2022 terbilang rendah, dikarenakan hingga juli realisasi baru tercatat 29,26 persen sedangkan target PAD pada tahun 2022 senilai Rp 68 miliar lebih namun yang terealisasi sebesar Rp 20 miliar, realisasi hingga juli masih sangat rendah hal ini dikarenakan dampak covid-19 yang terjadi.

Melihat dari fakta yang ada terkait adanya kenaikan dan penurunan dari target pendapatan asli daerah maka di perlukan konsep strategi guna meningkatkan target PAD yang diperlukan dalam pengelolaan yang lebih modern, cepat, tanggap, akurat dan memiliki strategi dan solutif agar bisa dijadikan sebagai tolak ukur dari daerah lain. Karena memang pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya guna proses pembangunan yang berkelanjutan yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat. Konsep strategi yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang menjadi hambatan bagi instansi BPKAD Kota Bima.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui strategi yang di terapkan oleh Pemerintah Kota Bima melalui BPKAD dalam upaya peningkatan PAD Kota Bima.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan PAD di Kota Bima

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, yang berminat dalam dalam bidang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi dinas BPKAD Kota Bima agar dapat mengimplementasikan strategi yang baik dan tepat sasaran agar tercapainya peningkatan PAD.

3. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna meraih gelar sarjana pada prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menambah wawasan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) dengan judul “upaya pemerintahan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame (studi pada BPKAD Kota Yogyakarta) tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana BPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sepertinya sudah baik, namun masih terdapat masalah pada bagian pendapatan karena masih banyak reklame liar atau tidak berizin. Perbedaanya yang sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu serta tempat penelitian dan judul penelitiannya, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta upaya dan strategi yang di ambil oleh BPKAD dalam meningkatkan pajak daerah salah satunya pajak reklame.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2017) dengan judul “upaya badan pengelolaan keungan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel kota Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dari hasil penelitian menunjukkan identifikasi objek untuk perluasan basis penerimaan tidak ada, tidak terdaftar pajak hotel baru, untuk evaluasi tarif pajak hotel sudah ditentukan berdasarkan Perda yang ada, melakukan audit secara rutin baik dari dinas maupun BPK, peningkatan moralitas dilakukan dengan evaluasi kinerja pegawai, terdapat teknologi informasi untuk transparansi kepada masyarakat luas, seperti SMS *GATEWAY* yang digunakan untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak PBB, namun perlu adanya sosialisasi serta pengembangan system informasi perhitungan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada tempat penelitian ,waktu dan judul penelitian yang di lakukan, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan upaya BPKAD melalui pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2022) dengan judul “Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang telah dilakukan secara optimal sehingga mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan, namun dalam pelaksanaanya

tetap ada beberapa hambatan seperti keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan, instrument penganggaran berbasis kinerja yang kurang efektif, dan tidak akuratnya data dan ketepatan waktu pencairan anggaran. Perbedaannya terletak pada waktu penelitian dan kurangnya strategi yang diambil terkait tidak akuratnya data dalam penelitian penulis, sedangkan persamaanya yaitu aset tetap daerah salah satu upaya BPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang di lakukan oleh Nugraha (2022) dengan judul “Optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Denpasar Provinsi Bali”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Denpasar belum berhasil mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap tanah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Denpasar Provinsi Bali, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik. Perbedaannya pada tempat penelitian dan waktu penelitian yang di lakukan oleh penulis, sedangkan persamaanya yaitu belum optimalnya aset tetap tanah yang di targetkan.

Penelitian yang di lakukan oleh Pratama (2021) dengan judul “Strategi badan pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah dalam peningkatan pajak reklame pada masa pandemic covid-19 di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi dari BPKAD Kota Surakarta dalam meningkatkan pajak reklame yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui *broadcast massege*

whatshapp dan sosialisasi paguyuban reklame, menerapkan penataan manajemen pelayanan yang baik, memberikan reward dan punishment bagi wajib pajak, meningkatkan kerja sama antar pihak ketiga, memaksimalkan UPT BPKAD diwilayah Kota Surakarta, meningkatkan patrol penertiban reklame illegal. Perbedaanya pada strategi yang di ambil oleh BPKAD Kota Surakarta dalam peningkatan pajak reklame, sedangkan persamaanya yaitu penulis tersebut melakukan penelitian terkait pajak reklame yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah begitu pula dalam penelitian saya yang mencakup beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah.

2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Strategi

1. Strategi

Strategi ialah pengelolaan mengenai formulasi, implementasian serta evaluasi kebijakan terkait strategi yang mengarahkan organisasi kepada tujuannya tercapai. Pengertian lain dari Lawrence R. Jauch dan William F. Gluech tentang manajemen strategi ialah beberapa kebijakan serta kegiatan yang menuju kepada perumusan sebuah strategi bahkan hingga beberapa strategi yang efektif untuk mendorong pencapaian target organisasi, Oleh karena itu manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu (Taufiqurokhman & Evi Satispi, 2018).

2. Manajemen strategi

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai

penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan di implementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. dikatakan bahwa manajemen stratejik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Menurut Bambang Haryadin (2003) manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi.

Menurut Mulyadi (2001) manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.

Secara umum, manajemen strategi memiliki tiga proses manajemen, yaitu (Kurniawan, 2016):

- 1) Tahap Formulasi Strategi: meliputi pembuatan visi, misi, tujuan dan sasaran, pengidentifikasian faktor internal dan eksternal organisasi, pembuatan rencana jangka menengah dan panjang, dan pembuatan strategi untuk diterapkan.

- 2) Tahap Implementasi Strategi: meliputi menentukan kebijakan, memotivasi sumber daya manusia organisasi, mengalokasikan sumber daya supaya perumusan strategi tersebut bisa diselenggarakan.
- 3) Tahap Evaluasi Strategi: meliputi memonitor seluruh hasil dari perumusan dan implementasi strategi, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

Dari ketiga tahap proses manajemen ini, akan digunakan untuk menganalisis strategi dinas BPKAD Kota Bima dalam upaya peningkatan PAD.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan 10 pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Pratiwi 2018: 35)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim 2004:96).

Dalam hal ini pemerintah memiliki sumber penerimaan dari sebelas kelompok, yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak reklame
4. Pajak hiburan
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak parkir
7. Pajak air tanah
8. Pajak sarang burung walis
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dan pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU N.28 TAHUN 2009)

2. Retribusi Daerah

Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (P.Siahaan, 2015:14)

Dengan adanya jenis dari pendapatan asli daerah ini sehingga mempermudah pemerintah mengetahui jumlah penerimaan PAD perbulan hingga pertahun yang masuk dalam APBD. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2.4. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut: Pengertian pajak menurut

Adriani dalam Yulianto (2011), bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Suandy (2011), bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.

2. Perpajakan secara umum

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo 2011 : 1)

a. Asas pemungutan pajak

Beberapa asas – asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1.) Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu Negara.

2.) Asas Domisili

Asas domisili disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

3) Asas Nasional

Asas ini adalah asas yang menganut pada cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

3. Teknik Pemungutan Pajak

Teknik pemungutan pajak adalah teknik atau tata cara yang dilakukan untuk menghitung besaran pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas Negara Menurut Andriani dalam Haula (2010:55-56).

Menurut Ilyas dan Richard Burton (2008) dalam bukunya hukum pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam system/teknik pemungutan pajak, diantaranya:

1.) *Official Assasment sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak yang bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2.) *Self assesment sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

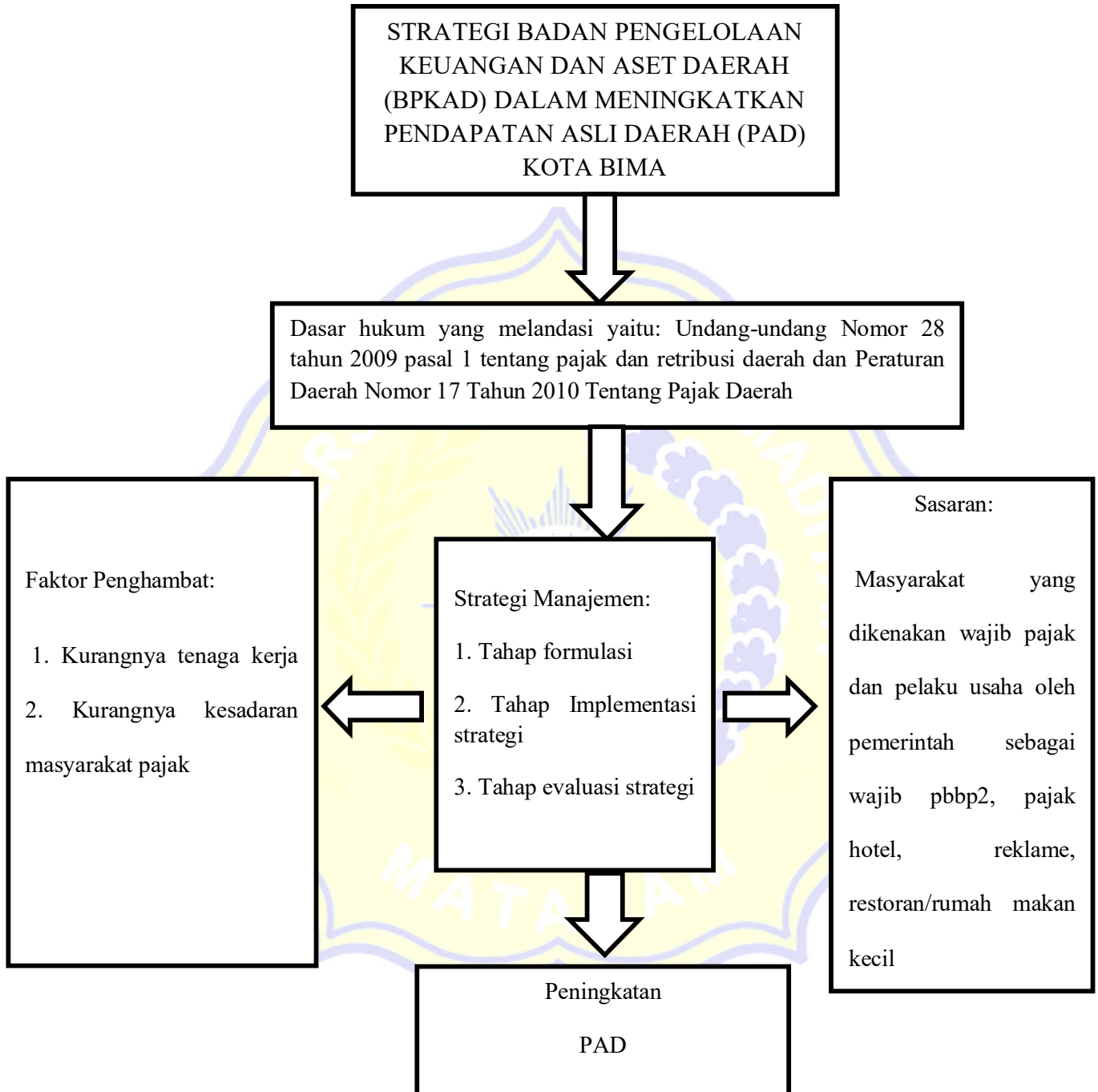
3.) *Semi self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya uang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4.) *Withholding system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.5. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya, Jauhari dalam Aulya (2018:59-60).

Menurut Sugiyono (2016:9) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti merasa bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan kenyataan. Selain itu metode kualitatif membangun hubungan langsung antara peneliti dan informan. Karena hal ini dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan dari naskah yang telah disediakan oleh peneliti berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, rekaman suara dan lainnya. Sehingga dari penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada dilapangan, melalui data-data yang di kumpulkan dalam bentuk dokumentasi maupun catatan yang di dapatkan selama penelitian dan mencocokkan dengan teori yang digunakan.

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Provinsi NTB, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima NTB dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan sejak Februari sampai Maret 2023, sesuai waktu yang di tentukan.

3.3. Pemilihan Informan/Responden

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling memahami tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin juga sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi yang diteliti (Sugiyono, 2015:54). Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria yang telah ditentukan para informan yang akan memberikan mengenai masalah yang diteliti, informan merupakan pimpinan atau staf yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima. Informan yang akan menjadi sumber penelitian adalah sebagai berikut:

Table 2 Daftar Nama Informan/Responden

No	Informan / narasumber	Jumlah
1	Kepala bidang pendataan dan penetapan BPKAD kota bima	1 orang
2	Kepala bidang penagihan dan pelayanan BPKAD kota bima	1 orang
3	Bidang Pengolahan Data Dan Informasi BPKAD Kota Bima	1 orang
4	Bidang Sekretariat BPKAD Kota Bima	1 orang

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut sugiyono (2015), sumber data penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektifemic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak biasa memaksakan kehendak untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis data penelitian yang di pergunakan adalah jenis data primer dan jenis data skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil angket yang di berikan kepada responden. Sedangkan data skunder diperoleh informasi dari pihak lain, seperti dokumen. Dokumen tertulis yang dalam instansi yang terkait pernyataan tersebut didasari oleh suatu pendapat yang mengatakan bahwa, untuk mencari sumber data adalah penting untuk di sadari bahwa menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan

penelitian) kita dapat menggolongkan jenis data ini dalam 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain-lain (Surakhmad, 1982)

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau strategis untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Tehnik Observasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian dilapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada dilapangan (Moloeng, 2010; 125-126)

2. Tehnik Wawancara

Teknik ini yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara secara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu istilah wawancara yang menggunakan bahasa yang baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur yaitu kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat berubah-ubah atau secara spontan yang belum ditentukan sebelumnya, (Deddy 2004).

3. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya, (Deddy 2004:195)

3.6. Tehnik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010:244). reaktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang lebih diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan

informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini.